

**“Menelusuri Praktik
Pemberian Amplop kepada Wartawan di
Semarang”**

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2
Magister Komunikasi**

**Muhammad Rofiuddin
Konsentrasi Kebijakan Media
Angkatan I**

**PROGRAM MAGISTER
ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Mei 2011**

TESIS

**“Menelusuri Praktik
Pemberian Amplop kepada Wartawan di
Semarang”**

Disusun oleh

Muhammad Rofiuddin

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada 13 Mei 2011

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Triyono Lukmantoro, M.Si.

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Komunikasi,

Dr. Sunarto

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Mei 2011

Muhammad Rofiuddin

BIODATA PENELITI:

Nama : Muhammad Rofiuddin

TTL : Blora, 5 Mei 1982

Alamat : Jalan Tanjungsari Barat III Nomor 4 Tambak Aji, Ngaliyan Semarang.

Email : rafi_udina@yahoo.co.id

Pendidikan formal : MI Nurul Huda Ngawen Blora
MTs Sultan Agung Ngawen Blora
MAN Lasem Rembang lulus tahun 2000
S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Pendidikan non formal: Pondok Pesantren Al-Wahdah, Lasem, Rembang.
: Madrasah Diniyah Nurul Huda Ngawen Blora.

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang praktik jurnalisme kaitannya dengan etika masih belum begitu banyak dilakukan. Selama ini, banyak penelitian para akademisi yang berfokus pada isi media dan kajian teoritik media sehingga penelitian lapangan mengenai persoalan etika jurnalistik kaitannya dengan pemberian imbalan kepada para jurnalis masih jarang dilakukan. Sedikit pengalaman saya yang sudah berprofesi sebagai jurnalis sejak 2005 mendorong saya untuk melakukan penelitian ini.

Ada banyak ungkapan terima kasih yang kami sampaikan kepada sejumlah pihak ketika penelitian ini berhasil diselesaikan. Pihak pertama adalah Program Magister Ilmu Komunikasi Undip yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami sehingga penelitian ini bisa kami lakukan. Mas Sunarto, selaku Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Undip, serta para dosen dan pembimbing yang tidak bisa kami sebut satu per satu yang rela mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada kami. Terima kasih juga untuk Mas Triyono Lukmatoro yang selalu memberikan banyak arahan dan bahan bacaan. Terima kasih juga untuk teman-teman angkatan satu MIKOM yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalamannya.

Terima kasih juga kepada para informan dalam penelitian ini, mulai dari para wartawan di Semarang, para narasumber/petugas humas, sejumlah perusahaan media, dan pengurus organisasi profesi kewartawanan di Semarang. Terima kasih juga kepada bapak/ibu saya, bapak Maskut Abbas dan ibu Mastik serta saudara-saudara saya (Mbak Dah, Mas Ali, Mbak Zul, Yusuf dan Lil). Terkhusus ucapan terima kasih untuk istri dan anak saya (Nur Azizah dan Rasyaf Mazka Alayya).

Semoga penelitian ini memberikan manfaat.

Terima kasih.

Semarang, 5 Mei 2011

Muhammad Rofiuddin

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Hal pernyataan.....	iii
Hal biodata	iv
Kata pengantar.....	v
Daftar isi.....	vi
Abstraksi.....	viii

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Kontribusi Penelitian.....	15
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritik.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	29
1.6.1. Tipe Penelitian.....	29
1.6.2. Subyek Penelitian.....	32
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.6.4 Analisis Data.....	37
1.6.5 Validasi data.....	38

BAB II: BUDAYA AMPLOP DAN NALAR KETERGANTUNGAN WARTAWAN

2.1. Sekilas Sejarah Praktik Amplop di Indonesia.....	39
2.2. Pengertian dan Kategori Amplop.....	46
2.3. Nalar Hadiah dalam Amplop.....	56

BAB III: POTRET WARTAWAN DI KOTA SEMARANG

3.1. Pemahaman Jurnalis tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).....	64
3.1.1 Pandangan Jurnalis terhadap Amplop.....	69
3.1.1.1. Definisi dan Kategori Amplop.....	69
3.1.1.2. Sikap Jurnalis terhadap Amplop.....	73
3.2. Relasi Wartawan dengan Perusahaan Media	76
3.2.1. Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis.....	76
3.2.1.1 Gaji dan Tunjangan Jurnalis Berstatus Kontrak atau Karyawan Tetap.....	77
3.2.1.2 Gaji dan Tunjangan Jurnalis Berstatus Koresponden atau Kontributor	81
3.2.2. Serikat Pekerja dan Kepemilikan Saham Perusahaan	84
3.3. Gaji Tak Pengaruhi Tolak Amplop.....	88
3.4. Pos Basah dan Kering.....	91
3.5. Amplop dan Obyektifitas Berita.	109
3.5.1. Terima Amplop = Tidak Bisa Obyektif.....	109
3.5.2. Terima Amplop Tetap Merasa Bisa Obyektif.....	112
3.6. Larangan Amplop di Perusahaan dan Organisasi Profesi.....	115

BAB IV: POSISI STRATEGIS JURNALIS DAN LINGKUNGAN PENUH AMPLOP

4.1. Pemahaman Narasumber terhadap KEJ.....	122
4.2. Pola Hubungan Narasumber dan Pemberian Amplop.....	126
4.3. Alasan narasumber memberikan amplop.....	139
4.4. Hubungan amplop dengan baik/buruknya berita.....	145
4.5. Posisi organisasi profesi dalam penegakan KEJ.....	152
4.5.1. Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah.....	153
4.5.1. Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang.....	159
4.6. Perusahaan Media “Cuci Tangan”, Amplop Wartawan Makin Marak.....	165
4.6.1. Perusahaan media cetak.....	166
4.6.2. Stasiun televisi lokal.....	169

BAB V: RENDAHNYA KOMITMEN PEMBERANTASAN AMPLOP WARTAWAN

5.1. Profesi wartawan antara hobi dan pekerjaan.....	175
5.2. Salah Kaprah Pandangan Narasumber.....	179
5.3. Karyawannya Menerima Amplop, Perusahaan Media Membiarkan.....	188
5.4. Lemahnya Posisi Organisasi Profesi.....	192
5.5. Urgensi Kode Etik Jurnalistik.....	194

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	202
B. Rekomendasi	103
C. Catatan Penelitian.....	209

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Koding Hasil Wawancara Informan
Transkrip Wawancara Informan Jurnalis
Transkrip Wawancara Informan Narasumber/Petugas Humas
Transkrip Wawancara Informan Pengelola Perusahaan Media
Transkrip Wawancara Pengurus Organisasi Profesi
Laporan observasi
Panduan daftar pertanyaan penelitian.

ABSTRAKSI

Praktik penyalahgunaan profesi wartawan selalu menjadi sorotan publik. Salah satunya terkait dengan praktik pemberian amplop kepada wartawan. Di Kota Semarang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga banyak wartawan yang mau menerima amplop. Padahal, Kode Etik Jurnalistik melarangnya.

Posisi wartawan dan media massa yang strategis, karena bisa menyampaikan pesan kepada khalayak, membuat para narasumber atau humas di berbagai instansi, baik negeri maupun swasta, selalu ingin dekat dengan wartawan. Salah satu caranya agar bisa menaklukkan wartawan itu adalah dengan memberikan amplop. Penelitian ini ingin melihat bagaimana dan mengapa praktik amplop wartawan di Kota Semarang?

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menyajikan sejumlah temuan. Meski sudah tahu bahwa menerima amplop melanggar KEJ tapi banyak wartawan yang bebas menerima amplop. Minimnya gaji yang mereka terima telah menjadi pemicu wartawan menerima amplop. Akibatnya, amplop dari narasumber tidak dianggap sebagai pelanggaran tapi justru dianggap sebagai rezeki. Meski begitu ada wartawan yang digaji kecil tapi karena memiliki idealisme, dia tidak mau menerima amplop. Adapun besaran amplop yang diterima wartawan sangat bervariasi, mulai dari Rp 50 ribu hingga ada yang mencapai jutaan rupiah.

Narasumber yang sering memberikan amplop adalah lembaga atau instansi yang membutuhkan pencitraan dan disana banyak perputaran uangnya, seperti di partai politik, DPRD Jawa Tengah dan perusahaan swasta. Narasumber/humas sudah menyadari bahwa memberikan amplop ke wartawan merupakan larangan. Tapi mereka tidak berani ambil resiko menghentikan amplop. Ada rasa takut akan dijauhi wartawan. Para wartawan semakin bebas menerima amplop karena banyak perusahaan media dan organisasi profesi sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap perilaku para wartawan.

Untuk menghentikan praktik amplop, setidaknya ada tiga pihak yang harus berperan. Ketiganya tidak perlu berjalan secara bersama-sama, tapi cukup salah satu diantara tiga pihak tersebut, yakni pribadi wartawan, tegasnya perusahaan media dan narasumber menghentikan pemberian amplop.

Rasionalisasinya, dalam keadaan apapun jika seorang wartawan idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Meski dengan gaji kecil dan tidak diawasi perusahaannya, tapi jika idealis maka tidak akan mau menerima amplop. Selanjutnya, jika wartawan tidak idealis tapi perusahaan media tegas maka praktik amplop juga tidak terjadi. Sebab, jika perusahaan tegas maka wartawan penerima amplop akan dipecat. Selanjutnya, seburuk apapun kualitas wartawan dan seminim apapun pengawasan, tapi jika narasumber tidak memberikan amplop maka praktik amplop juga tidak akan terjadi. Kecenderungannya, narasumber memberikan amplop ke wartawan karena ingin diberitakan atau kasusnya tidak diungkap. Cara pandang seperti itu harus diubah. Narasumber harus kreatif agar kegiatannya diliput wartawan. Selain itu, jika ingin tidak diberitakan keburukannya maka jangan sekali-kali berbuat keburukan.

ABSTRACT

The abuse of the journalism ethic has always been a misuse of the public spotlight. One abuse relates to “envelopes” or bribery. In Semarang, the capital city of Central Java province, many journalists are willing to receive the envelopes. Besides, the Code of Journalism Ethics forbids it.

The position of journalists and mass media are strategic, because they convey a message to the audience. It makes many groups such as public relations of government and private sector, politicians, and others want to have close relationship to the journalists. One way to reach this goal is provide envelopes. This study wanted to see how and why the practice of bribery for Semarang journalist?

This research uses qualitative descriptive method. There are some a number of findings below. The journalists know that receiving an envelope is not permitted based on Journalism Ethic, but they are due to practice it. The amount of envelope is varies greatly, ranging from 50 thousand rupiahs to millions of rupiahs. The journalists who receive the envelopes call the lack of salary as one of the reason. Since that the envelope is not considered as violation of Ethic Journalism, but as regard or sustenance. Nevertheless, some journalists are unwilling to receive envelopes. They, which are called as idealistic journalist, feel envelopes influence their independence.

The groups who often provide the envelope are public relation of government, party officer, legislative, and private sector. Informant of the research was already aware that give envelopes is a ban. But they do not obey it. They do not want their relationship to the journalist is broken. Since that journalists are increasingly free to accept the envelope. In addition, media companies and professional organizations do not supervise the conduct of journalists.

To stop it, at least there are three factors to play a role, which are journalists, media companies, and public relation or agencies. These factors must not be done together, but simply one among them.

The reason is under any circumstances idealistic journalists always deny the envelope. They ignore the small salary and minimum media company surveillance. If the journalist is not idealistic but the surveillance of media company to their journalist is strictly, nothing is happened. If the journalists with minimum media company surveillance meet the agencies whom does not give the envelope, the practices will not happen. As we know, the agencies give the envelope to get positive image and close their weakness. This way should be changed. The agencies should be creative in order to make activities which will be covered by journalists. Finally, if they do not want to be preached their ugliness, they should work on the track or not to abuse of power.